

Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang Jasa Dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran Di Kabupaten Kediri

Indah Purwati¹, Arisyahidin², Abu Talkah²

¹Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri

²Magister Manajemen Universitas Islam Kediri

email : indahpurwati905@gmail.com

Abstract

Absorption of local government budgets is the accumulation of budget absorption carried out by each Institution, and can be one of the indicators in assessing the financial management performance of a region, because through the level of budget absorption it can be seen the description or performance and capabilities of a region. The region implements and is responsible for every planned activity. Budget absorption in Kediri Regency during the 2016 - 2020 period reached the range of 81.68% - 88.79%.

This study aims to identify and analyze the factors that are considered dominant in influencing budget absorption in Kediri Regency, namely budget planning and implementation, human resources, procurement of goods and services, and the bureaucratic environment. Sources of data in the form of primary data and secondary data. Primary data in the form of questionnaires were distributed based on purposive random sampling to 15 institutions with the largest budget in Kediri Regency. The research method used is quantitative using Multiple Linear Regression Analysis. This study uses 5 (five) independent variables, namely budget planning (X1), budget execution (X2), human resources (X3), procurement of goods and services (X4), bureaucratic environment (X5), and 1 (one) dependent variable. . variable. namely budget absorption (Y).

The results showed that the five independent variables simultaneously had a positive effect on budget absorption. Partially, the variables of budget planning, budget execution, human resources and procurement of goods and services have a positive effect on budget absorption, while the bureaucratic environment variable has a negative effect on budget absorption. Partially, the variable that has the most dominant influence on budget absorption is the Procurement of Goods and Services. Overall, the magnitude of the influence of budget planning, budget execution, human resources, procurement of goods and services and the bureaucratic environment on budget absorption is explained by the determination value of 41%, while 59% is influenced by other factors outside the study.

Keywords: Budget Absorption, Budget Planning, Budget Execution, Human Resources, Procurement of Goods and Services, Bureaucratic Environment.

Latar Belakang Teoritis

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Damayanti, 2017). Penganggaran dalam sektor publik merupakan tahapan yang sangat rumit dan mengandung unsur politik yang tinggi. Proses paling rumit dalam konteks politik yang berhubungan dengan politik adalah upaya untuk membuat keputusan guna menyelesaikan suatu fenomena atau gejala sosial ekonomi yang muncul. Pengambilan keputusan tentu saja berproses panjang (Damayanti, 2017). Penganggaran pemerintahan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini.

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan suatu daerah, karena melalui tingkat penyerapan anggaran dapat diketahui gambaran atau kinerja dan kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan (Arfan 2017). Penyerapan anggaran adalah salah satu dari beberapa tahapan dalam siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/DPRD), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggung-jawaban anggaran. (Iqbal, 2018).

Masalah yang selalu muncul dalam hal anggaran di pemerintahan adalah ketidaksesuaian penyerapan anggaran dengan targetnya. Kegagalan target penyerapan anggaran berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semua dapat dimanfaatkan oleh pemerintah yang artinya ada dana yang menganggur (BPKP, 2011 dalam Meyulinda, 2018). Menurut Noviwijaya, A. dan Rohman, A. (2013), Pengukuran penyerapan anggaran satuan kerja adalah proporsi/persentase jumlah anggaran yang telah direalisasikan dalam satu tahun anggaran terhadap jumlah pagu anggaran (Zarinah, 2016) sedangkan menurut Kuncoro (2013) tingkat penyerapan anggaran merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target rencana yang telah dicapai oleh instansi.

Mengukur daya serap membutuhkan lebih dari sekedar membandingkan dana yang tersedia dan pengeluaran yang sebenarnya. Bahkan jika 100 persen dari anggaran yang dialokasikan dihabiskan mungkin ada kendala daya serap yang telah menyebabkan realokasi dana atau kegagalan untuk melaksanakan rencana kerja (Zarinah, M. et al., 2016).

Terdapat dua sudut pandang mengenai rendahnya penyerapan anggaran (Halim,

2014) yaitu realisasi anggaran pada akhir tahun dibandingkan dengan rencana anggarannya, dan sudut pandang dari segi tidak proporsionalnya penyerapan anggaran. Iqbal (2018) menuliskan bahwa efektivitas penyerapan anggaran lebih menekankan pada pencapaian segala sesuatu yang dilaksanakan berdaya guna yang berarti tepat, cepat, hemat, dan selamat. Penjelasannya sebagai berikut :

1. Tepat, diartikan bahwa apa yang dikehendaki tercapai memenuhi target dan apa yang diinginkan menjadi realitas.
2. Cepat, diartikan bahwa pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sesuai atau sebelum waktu yang ditetapkan.
3. Hemat, diartikan bahwa tidak terjadi pemborosan dalam bidang apapun dalam pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan tersebut.
4. Selamat, diartikan bahwa tidak mengalami hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan kegagalan sebagian atau seluruh usaha pencapaian tujuan.

Tahapan perencanaan dalam sebuah organisasi sangat penting tidak terkecuali pada organisasi sektor publik karena dipandang sebagai faktor penentu keberhasilan pencapaian kinerja yang ditunjukkan dengan tingginya penyerapan anggaran. Proses perencanaan pada anggaran merupakan tahap awal untuk mengalokasikan sumber daya atau anggaran yang dimiliki.

Secara umum perencanaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan telah lalu. Perencanaan (*planning*) merupakan proses yang diawali dengan penetapan tujuan organisasi berupa penentuan strategi untuk pencapaian tujuan secara menyeluruh serta perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga tercapainya tujuan tersebut (Bastian 2010 dalam Iqbal, 2018). Perencanaan dapat dilihat dalam tiga kategori, yaitu:

1. Kategori Proses

Perencanaan merupakan suatu proses dasar yang digunakan untuk memilih

tujuan dan menentukan cara atau strategi dalam pencapaian tujuan tersebut.

2. Kategori Fungsi Manajemen
Perencanaan berfungsi pada kondisi dimana pimpinan menggunakan pengaruh atau wewenangnya untuk menentukan atau mengubah tujuan serta kegiatan organisasi.
3. Kategori Pengambilan Keputusan
Perencanaan adalah pengambilan keputusan jangka panjang atau yang akan datang mengenai hal yang akan dilakukan, cara pelaksanaan, dan waktu serta pelaku hal tersebut. Dalam perencanaan, keputusan yang diambil belum tentu sesuai dengan tujuan sebelumnya sehingga implementasi perencanaan tersebut akan dibuktikan pada masa yang akan datang.

Proses perencanaan dan penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Penyusunan RKPD merupakan tahapan awal dalam perumusan APBD. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Pusat. RKPD tersebut memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
Setelah RKPD ditetapkan, Pemerintah daerah perlu menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang

kemudian menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Kebijakan Umum APBD (KUA)

3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Selanjutnya berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan PPAS tersebut disusun dengan tahapan; menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan; menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)
Selanjutnya menyusun RKA-SKPD yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dijabarkan sampai dengan penjabaran objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. RKA-SKPD juga memuat informasi tentang urusan pemerintahaan daerah, organisasi, standar biaya, pretasi kerja yang dicapai dari program da kegiatan.
5. Penyiapan Raperda APBD.
Selanjutnya berdasarkan pada RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD dilakukan pembahasan penyusunan Raperda oleh TAPD. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta

sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.

6. Penetapan APBD

Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tersebut dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kinerja APBN/APBD adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran (Damayanti, 2017). Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Pelaksanaan anggaran adalah tahap yang sangat penting dalam perealisasi program dan kegiatan pemerintah yang telah dibuat.

Idealnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dapat langsung dilaksanakan dan tidak mengalami perubahan. Hal ini penting agar pelaksanaan program dan kegiatan berpedoman pada kepastian (*Certainty*). Namun dalam perjalanan waktu ada pengaruh faktor eksternal dan internal yang memberikan dampak yang signifikan sehingga menimbulkan :

1. Adanya pergeseran, fenomena serta perubahan variabel-variabel ekonomi makro dan keuangan;
2. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (KUA);
3. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

Dalam pelaksanaan anggaran kerap kali terjadi kendala-kendala yang mengakibatkan suatu program/kegiatan tidak dapat dilakukan sesuai jadwal atau rencana awal sehingga mempengaruhi realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Ini menyebabkan pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai oleh anggaran akan mundur waktu pelaksanaannya dan otomatis akan memundurkan waktu penyerapan anggaran. Jauhari (2017) menemukan bahwa lambatnya pelaksanaan anggaran menjadi penyebab terjadinya penumpukan belanja di akhir tahun anggaran.

Sumber daya manusia diidentifikasi mempengaruhi penyerapan anggaran. Menurut Sutrisno (2016) sumber daya manusia merupakan sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya (rasio, rasa dan karsa). Faktor Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di tingkat satker, terutama sumber daya manusia pengelola keuangan. Sumber daya manusia pada proses anggaran erat kaitannya dengan kapasitas dan kemampuan individu untuk menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan keuangan instansi pemerintah (Amiruddin 2009 dalam Alimuddin 2018). Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang juga terkait erat dengan penyerapan anggaran karena manusia merupakan aktor yang melakukan proses penganggaran. Sumber daya manusia adalah bisa berupa staff, informasi, kewenangan, fasilitas lain. Menurut Amirudin, 2009 (dalam Alimuddin, 2018), kapasitas sumber daya manusia adalah jumlah dari anggota eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam proses penyusunan kebijakan dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah. Kesesuaian antara Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki dengan deskripsi pekerjaan yang dilaksanakan menjadi salah satu hal penting dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat yang optimal.

Sumber Daya Manusia berhubungan dengan kemampuan terhadap detail tugas dan tanggung jawab pada tingkat : (1)

mempersiapkan deskripsi pekerjaan; (2) jumlah dan kualifikasi staf; dan (3) terpenuhinya kebutuhan perekrutan. Faktor kunci keberhasilan dalam pengelolaan anggaran adalah staf yang berpengalaman dan mempunyai motivasi. Disetiap Instansi Pemerintah harus mempunyai sumber daya yang terlatih dan mampu menangani tugas-tugasnya. Staf juga harus dilengkapi dengan uraian tugas yang tepat (Alimuddin, 2018).

Herriyanto, 2012 (dalam Alimuddin, 2018) Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dengan alternatif solusi kebijakan, adalah :

1. Memberikan reward berupa honorarium yang lebih besar dari honorarium yang telah ditetapkan sebelumnya guna untuk mendorong motivasi;
2. Memberikan dorongan motivasi berupa penghargaan baik berupa materi maupun immateri.

Zarinah (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka akan semakin baik pula tingkat penyerapan anggaran. Begitu pula dengan Malahayati (2017) menemukan bahwa SDM berpengaruh terhadap tingkat serapan anggaran suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Utomo, 2011 (dalam Zulaikah 2019) mengemukakan upaya pembinaan untuk meningkatkan kualitas SDM dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kedisiplinan, profesionalitas, dan produktivitas. Upaya penataan SDM, khususnya pada sektor publik agar lebih baik lagi juga dapat dilakukan melalui perbaikan penghasilan/remunerasi.

Selanjutnya, yang juga mempengaruhi penyerapan anggaran adalah pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan hakikat dari tugas organisasi sektor publik (Bastian, (2010:263) dalam Alimuddin 2018. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dimaksud dengan pengadaan barang/jasa pemerintah (yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa) adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian atau Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat

Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Pengadaan barang/jasa ini akan mempengaruhi terjadinya penyerapan pada anggaran pemerintah. Semakin banyak pengadaan barang/jasa yang dilakukan maka otomatis penyerapan anggaran pun akan semakin banyak. Demikian pula sebaliknya, semakin sedikit pengadaan barang/jasa yang dilakukan maka otomatis penyerapan anggaran pun akan semakin sedikit. Hal ini telah dibuktikan secara empiris oleh Sudarwati, Karamoy, dan Pontoh (2017), yang menemukan bahwa faktor pengadaan barang/jasa yang kurang baik menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penumpukan realisasi anggaran. Demikian juga dengan Nugroho dan Alfarisi (2017) yang menemukan bahwa faktor pengadaan barang/jasa pemerintah mempengaruhi besaran realisasi penyerapan anggaran. Pengadaan barang/jasa melibatkan pihak lain di luar instansi pemerintahan yaitu pihak ketiga sehingga kemungkinan terjadinya permasalahan pun tidak dapat dihindari.

Faktor lain yang diduga juga berpengaruh terhadap penyerapan anggaran adalah lingkungan Birokrasi. Menurut Meyulinda (2018) Kondisi atau keadaan yang ada pada pemerintah daerah akan sangat mempengaruhi berjalan lancar atau tidak kegiatan mereka. Birokrasi merupakan alat atau mekanisme yang dibuat untuk kesuksesan dan efisiensi suatu pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Lingkungan birokrasi yang baik akan membuat pelaksanaan kegiatan operasional menjadi lancar. Namun jika lingkungan birokrasi tidak mendukung kegiatan organisasi maka akan menghambat kinerja organisasi (Eisenstadt 1959 dalam Meyulinda 2018). Oleh karena itu, lingkungan birokrasi akan mempengaruhi penyerapan anggaran. Semakin baik koordinasi dalam implementasinya antara penerima amanah (agent) dan pemberi amanah (principal) akan semakin memudahkan pemegang amanah (agent) dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada di Satuan Kerja, sehingga diharapkan serapan anggaran dapat lebih cepat dilakukan. (Meyulinda, 2018).

Hasil penelitian Juliani, 2014; Ledy S. Gagola, dkk 2016; Meyulinda Aviana Alim, dkk 2018, memberikan hasil bahwa lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Lingkungan birokrasi mempengaruhi penyerapan anggaran karena adanya dukungan dan kondusifitas kondisi dan keadaan di SKPD dapat mendukung penyerapan anggaran menjadi lebih baik.

Secara ringkas penyerapan anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, sumber daya manusia, pengadaan barang jasa, lingkungan birokrasi. Berdasarkan faktor faktor tersebut, maka dalam penelitian ini diambil lima faktor yang digunakan sebagai pokok – pokok pembahasan dan sebagai variabel independen (X) yaitu : Perencanaan Anggaran (X1), Pelaksanaan Anggaran (X2), Sumber Daya Manusia (X3), Pelaksanaan Barang Jasa (X4), Lingkungan Birokrasi (X5). Dari lima variabel independen tersebut akan dilihat pengaruhnya terhadap Penyerapan Anggaran (Y) sebagai variabel dependen.

A. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive random sampling*, yaitu cara untuk memperoleh sampel dengan menggunakan kriteria tertentu secara acak, yang dalam penelitian ini adalah pegawai yang berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran dan juga mempunyai wewenang untuk mengusulkan dan membuat keputusan mengenai anggaran, yaitu Pengguna Anggaran (PA) yaitu Kepala Dinas/Badan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Kepala Bidang / Bagian, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Kasubbag / Kasie pada 15 SKPD yang mempunyai anggaran tertinggi di Kabupaten Kediri pada tahun anggaran 2020.

Data berupa data primer yaitu kuisioner, dan juga didukung dengan data sekunder yaitu studi pustaka. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari lima variabel independen dan satu variabel dependen, yaitu : perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, dan lingkungan birokrasi, sebagai variabel

independen, sedangkan satu variabel dependen adalah penyerapan anggaran.

1. Perencanaan Anggaran (X1)

Perencanaan Anggaran merupakan proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu, (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2013:127). Variabel perencanaan (X1) diukur dengan menggunakan indikator proses penyusunan anggaran di SKPD, pembahasan di dewan sampai persetujuan anggaran oleh dewan dengan menggunakan 14 (empat belas) pernyataan.

2. Pelaksanaan Anggaran (X2)

Pelaksanaan anggaran diukur dengan indikator penetapan dan pengesahan anggaran dan perubahannya, pengangkatan pejabat pengelola kegiatan, dengan menggunakan 6 (enam) pernyataan.

3. Sumber Daya Manusia (X3)

Manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi merupakan potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya, (Alimuddin, 2018)

Variabel sumber daya manusia (X3) diukur dengan menggunakan 4 indikator dijelaskan pada penelitian Ridani (2014) dan Juliani dan Sholihin (2016) dalam Alimuddin 2018, yaitu Pengalaman Kerja, Pelatihan /Training, Pendidikan, serta Dukungan dan penghargaan, dengan menggunakan 13 (tiga belas) pernyataan.

4. Pengadaan Barang dan Jasa (X4)

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa pemerintah (Alimuddin, 2018)

Variabel Pengadaan barang jasa, diukur dengan indikator penetapan SK pejabat pengelola pengadaan, proses pengadaan barang jasa, proses administrasi pengadaan barang jasa, proses pembayaran, dengan menggunakan 17 (tujuh belas) pernyataan.

5. Lingkungan Birokrasi

Lingkungan birokrasi, diukur dengan indikator lingkungan kerja, hubungan antara atasan dan bawahan, hubungan antara pengelola pengadaan dan pengelola keuangan, proses pencairan anggaran, dengan menggunakan 11 (sebelas) pernyataan.

6. Penyerapan Anggaran (Y)

Penyerapan Anggaran diukur dengan menggunakan indikator yang dijelaskan pada penelitian Manasan dan Mercado, (2001) dalam Alimuddin (2019). Indikator penyerapan anggaran dijabarkan dalam poin kuesioner penyerapan anggaran yang terdiri dari kondisi proporsional penyerapan anggaran, persentase serapan anggaran dan prosentase sisa lebih anggaran, proses pencairan anggaran, dengan menggunakan 8 (delapan) pernyataan.

Analisa data pada penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas yaitu perencanaan anggaran (X1), pelaksanaan anggaran (X2), sumber daya manusia (X3), pengadaan barang dan jasa (X4), lingkungan birokrasi (X5), terhadap variabel terikat yaitu penyerapan anggaran (Y), yang dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Dimana :

- b₀ = Konstanta
- X₁ = Perencanaan anggaran
- X₂ = Pelaksanaan Anggaran
- X₃ = Sumber Daya Manusia
- X₄ = Pengadaan barang dan jasa
- X₅ = Lingkungan Birokrasi
- Y = Penyerapan anggaran
- b₁, b₂, b₃, b₄, b₅, b₇ = Koefisien regresi untuk X₁, X₂, X₃, X₄, X₅,
- e = error term

Uji Kualitas Data

Uji kualitas data diperlukan karena data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data primer. Secara statistic uji kualitas data sebenarnya tidak perlu dilakukan, karena kuisoner dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian penelitian terdahulu yang tentunya juga sudah diuji, namun untuk memberikan keyakinan uji kualitas data juga dilakukan, yaitu dengan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan analisis regresi yang bertujuan agar analisis regresi menghasilkan nilai parameter yang sah dan menjadi valid sebagai alat penduga. Uji asumsi klasi untuk analisis regresi berganda meliputi : normalitas data, linieritas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah uji signifikansi parameter, digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan parameter di dalam model regresi. Uji signifikansi parameter dilakukan secara serentak (simultan) yaitu Uji Statistik F dan secara parsial yaitu Uji Statistik t.

B. Hasil Dan Pembahasan

Uji Kualitas Data

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan Uji *Korelasi Product Moment* dengan membanding nilai r hitung dengan r tabel dan nilai signifikansi. Jika nilai r hitung > r tabel dan nilai signifikansi < 0.05 maka dapat dikatakan bahwa indikator adalah valid, sebaliknya jika nilai r hitung < r tabel dan nilai signifikansi > 0.05 maka dapat dikatakan bahwa indikator adalah tidak valid. Dari hasil pengujian dengan menggunakan SPSS versi 25, didapati nilai probabilitas korelasi [sig.(2-tailed) < dari taraf signifikan (α) sebesar 0.05, sehingga dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan di semua variabel adalah valid.

Uji reabilitas dengan melihat nilai *cronbach's alpha* (α), yaitu apabila nilai *cronbach's alpha* (α) lebih besar > 0.60 maka indikator atau kuesioner adalah reliabel, sedangkan apabila nilai *cronbach's alpha* (α) lebih kecil < 0.60 maka indikator atau kuesioner tidak reliable. Berdasarkan output SPSS versi 5, menunjukkan bahwa semua variable mempunyai nilai r alpha hitung lebih besar dari nilai r alpha tabel, sehingga dapat dikatakan bahwa semua variabel tersebut (perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, sumber daya manusia, pengadaan barang jasa, lingkungan birokrasi) adalah reliabel dan dapat dipercaya.

Deskripsi hasil penelitian perlu dilakukan bertujuan untuk memberikan

gambaran dari data yang tersaji agar menjadi mudah dipahami dan informatif bagi orang yang membacanya.

Descriptive Statistics					
VARIABEL	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penyerapan Anggaran (Y)	82	1,75	5,00	3,80	0,74324
Perencanaan Anggaran (X1)	82	2,57	5,00	4,23	0,59714
Pelaksanaan Anggaran (X2)	82	1,83	5,00	4,11	0,75477
Sumber Daya Manusia (X3)	82	1,69	5,00	3,82	0,70269
Pengadaan Barang Jasa (X4)	82	2,00	5,00	3,78	0,69410
Lingkungan Birokrasi (X5)	82	2,18	5,00	4,15	0,63484
Valid N (listwise)	82				

Sumber: Output SPSS Statistics 25 diolah (2021)

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Berdasarkan tabel 1, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Variabel penyerapan anggaran mempunyai nilai rata rata sebesar 3,80 dimana nilai minimum 1,75 dan nilai maksimum 5,00 dengan standar deviasi sebesar 0,74324. Hal ini berarti bahwa berdasarkan persepsi dari total 82 responden menyatakan bahwa penyerapan anggaran di Kabupaten Kediri kurang baik atau kurang maksimal.
2. Variabel perencanaan anggaran mempunyai nilai rata rata sebesar 4,23 dimana nilai minimum 2,57 dan nilai maksimum 5,00 dengan standar deviasi sebesar 0,59714. Hal ini berarti bahwa berdasarkan persepsi dari total 82 responden menyatakan bahwa perencanaan anggaran di Kabupaten Kediri sudah baik.
3. Variabel pelaksanaan anggaran mempunyai nilai rata rata sebesar 4,11 dimana nilai minimum 1,83 dan nilai maksimum 5,00 dengan standar deviasi sebesar 0,75477. Hal ini berarti bahwa berdasarkan persepsi dari total 82 responden menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran di Kabupaten Kediri sudah baik.
4. Variabel sumber daya manusia mempunyai nilai rata rata sebesar 3,82 dimana nilai minimum 1,69 dan nilai maksimum 5,00 dengan standar deviasi sebesar 0,70269. Hal ini berarti bahwa

berdasarkan persepsi dari total 82 responden menyatakan bahwa sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan keuangan di Kabupaten Kediri masih tergolong kurang baik.

5. Variabel pengadaan barang jasa mempunyai nilai rata rata sebesar 3,78 dimana nilai minimum 2,00 dan nilai maksimum 5,00 dengan standar deviasi sebesar 0,69410. Hal ini berarti bahwa berdasarkan persepsi dari total 82 responden menyatakan bahwa kegiatan pengadaan barang jasa di Kabupaten Kediri masih tergolong kurang baik.
6. Variabel lingkungan birokrasi mempunyai nilai rata rata sebesar 4,15 dimana nilai minimum 2,18 dan nilai maksimum 5,00 dengan standar deviasi sebesar 0,63484. Hal ini berarti bahwa berdasarkan persepsi dari total 82 responden menyatakan bahwa lingkungan birokrasi di Kabupaten Kediri tergolong sudah baik.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov*, dimana jika nilai probabilitas *asyp.sig* (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan bahwa data berdistribusi normal, sebaliknya jika probabilitas *asyp.sig* (2-tailed) lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan bahwa data tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2018).

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test							
		Perencanaan Anggaran	Pelaksanaan Anggaran	Sumber Daya Manusia	Pengadaan Barang Dan Jasa	Lingkungan Birokrasi	Penyerapan Anggaran
N		82	82	82	82	82	82
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	50,5122	24,6463	49,7073	64,2805	45,5976	30,4146
	Std. Deviation	3,94794	2,98710	4,38428	5,09484	3,53766	3,50644
Most Extreme Differences	Absolute	0,097	0,087	0,093	0,087	0,094	0,096
	Positive	0,097	0,087	0,093	0,087	0,086	0,096
	Negative	-0,083	-0,083	-0,053	-0,053	-0,094	-0,087
Test Statistic		0,097	0,087	0,093	0,087	0,094	0,096
Asymp. Sig. (2-tailed)		.054 ^c	.186 ^c	.075 ^c	.185 ^c	.070 ^c	.061 ^c

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.

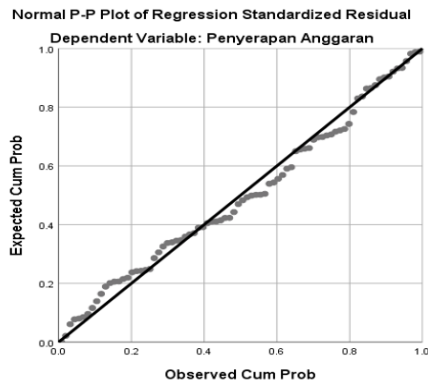
Sumber: Output SPSS Statistics 25 diolah (2021)

Tabel 2. Hasil Uji Kolmogorv – Smirvov

Dalam tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai *asyp.sig* (2-tailed) untuk variable perencanaan anggaran sebesar 0,054;

pelaksanaan anggaran sebesar 0.186; sumber daya manusia sebesar 0,075; pengadaan barang jasa sebesar 0,185; lingkungan birokrasi sebesar 0,070; dan penyerapan anggaran sebesar 0,061. Semuanya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal.

Pengujian normalitas juga menggunakan Uji P-Plot yaitu dengan menguji sebaran data, dan hasilnya sebaran data berada di sekitaran garis diagonal, hal ini dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, seperti terlihat dalam grafik 1.



Sumber: *Output SPSS Statistics 25* diolah (2021)

Grafik 1. Hasil Uji P-Plot

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linier atau tidak antara variable X dan variabel Y. Uji linieritas dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi pada tabel ANOVA, dimana jika Sig. tabel < 0.05 maka ada hubungan yang linier.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	407.837	5	81.567	10.542	.000 ^b
	Residual	588.066	76	7.738		
	Total	995.902	81			

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran
 b. Predictors: (Constant), Lingkungan Birokrasi, Pengadaan Barang Dan Jasa, Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggara

Sumber: *Output SPSS Statistics 25* diolah (2021)

Tabel 3. Tabel ANOVA

Berdasarkan tabel 3, diketahui nilai Sig. tabel 0.000 < 0.05 maka artinya ada hubungan yang linier antara perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, sumber daya manusia, pengadaan barang jasa, dan

lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi atau tidak antar variabel independen, dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-3,738	5,434		-0,688	0,494		
	Perencanaan Anggaran	0,209	0,100	0,235	2,092	0,040	0,616	1,623
	Pelaksanaan Anggaran	0,340	0,161	0,290	2,110	0,038	0,412	2,425
	Sumber Daya Manusia	0,219	0,085	0,273	2,581	0,012	0,693	1,443
	Pengadaan Barang Dan Jasa	0,195	0,067	0,284	2,899	0,005	0,811	1,232
	Lingkungan Birokrasi	-0,179	0,144	-0,181	-1,249	0,215	0,370	2,704

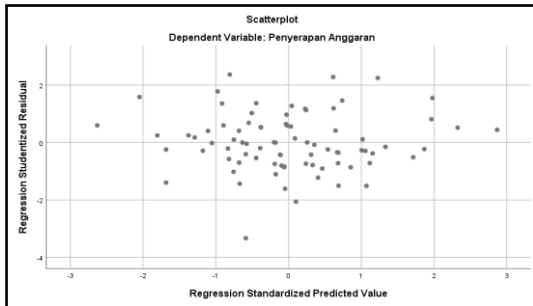
a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Sumber: *Output SPSS Statistics 25* diolah (2021)

Tabel 4. Tabel Koefisien

Dari hasil pengujian multikolinieritas pada tabel 4 dapat diketahui bahwa perencanaan anggaran memiliki nilai tolerance sebesar 0.616, pelaksanaan anggaran sebesar 0.412, sumber daya manusia sebesar 0.692, pengadaan barang jasa sebesar 0.811 dan lingkungan birokrasi sebesar 0.370. Nilai tolerance kelima variabel tersebut > 0,10. Nilai VIF perencanaan anggaran sebesar 1.623, pelaksanaan anggaran sebesar 2.425, sumber daya manusia sebesar 1.443, pengadaan barang jasa sebesar 1.232 dan lingkungan birokrasi sebesar 2.704. Nilai VIF kelima variabel tersebut < 10. Dari data ini dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas karena lima variabel bebas memiliki nilai tolerance > 0.10 dan VIF < 10.

Uji Heteroskedastisitas adalah uji untuk menguji apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Penelitian ini menggunakan metode grafik plot, untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat dalam Grafik 2.



Sumber: *Output SPSS Statistics 25* diolah (2021)

Grafik 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik 2 dapat dilihat bahwa data menyebar di atas dan di bawah angka 0 dan pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi kolerasi, maka dinamakan ada problem autokolerasi (Ghozali, 2018). Uji autokorelasi menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test) dapat dilihat pada tabel 5.

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.640 ^a	.410	.371	2.78167	1.646

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Birokrasi, Pengadaan Barang Dan Jasa, Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran

b. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Sumber: *Output SPSS Statistics 25* diolah (2021)

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Dari tabel 5 diketahui bahwa hasil uji Durbin-Watson sebesar 1.646 nilai dibandingkan dengan tabel Durbin-Watson

signifikan 5%, jumlah sampel 82 (n), dan jumlah variabel independen 5 (k=5), maka dari tabel Durbin-Watson akan didapat nilai dl 1.21 dan nilai du sebesar 1.629. Karena nilai DW 1.646 lebih besar dari batas atas nilai du dan kurang dari nilai 4 – 1.629 yang hasilnya 2,371. Dengan demikian dapat disimpulkan nilai Durbin-Watson (DW) terletak antara du s/d 4-du sehingga tidak terjadi autokolerasi.

Pengujian Hipotesis

Hasil uji F yang juga dapat dilihat dari tabel ANOVA di tabel 3 diperoleh nilai F hitung 10.542 dan nilai signifikasi 0.000 < 0.05, yang berarti semua variabel independen yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, sumber daya manusia, pengadaan barang jasa dan lingkungan birokrasi secara bersama sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu penyerapan anggaran dengan peluang salah sebesar 0,00% (signifikasi pada level 1%).

Koefisien determinasi R² berguna untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variable X secara simultan (bersama sama) terhadap variable Y. Dari tabel 5 diperoleh diperoleh nilai R Square (R2) sebesar 0,410. Hal ini berarti bahwa perubahan variabel Penyerapan Anggaran, sebesar 41 % dapat dijelaskan oleh variable perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sumber daya manusia, pengadaan barang jasa, dan lingkungan birokrasi secara bersama sama. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 59% dijelaskan oleh variable lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Koefisien R sebesar 0,640 mengartikan bahwa variable perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sumber daya manusia, pengadaan barang jasa, dan lingkungan birokrasi secara bersama sama 64% berpengaruh positif terhadap Penyerapan Anggaran.

Uji statistik t dapat diketahui dari tabel koefisien di tabel 4. Karena koefisien Unstandardized menunjukkan nilai konstanta negatif, maka model regresi menggunakan Koefisien Regresi Standardized yang ditulis dengan persamaan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Penyerapan Anggaran} &= 0,235 \\ &+ \text{Perencanaan Anggaran} + 0,290 \\ &+ \text{Pelaksanaan Anggaran} + 0,273 \\ &+ \text{Sumber Daya Manusia} + 0,284 \end{aligned}$$

Pengadaan Barang Jasa – 0,181 Lingkungan Birokrasi.

Dari persamaan di atas berarti bahwa setiap perubahan variable Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang Jasa, setiap unit perubahan variable tersebut berpengaruh nyata dan positif terhadap perubahan variable Penyerapan Anggaran masing masing sebesar 23,5% 29,0%, 27,3% dan 28,4% dengan arah yang sama. Artinya secara parsial jika Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang Jasa ada kenaikan 1 unit, maka Penyerapan Anggaran akan naik sebesar koefisien regresinya, begitu juga sebaliknya. Sedangkan variable Lingkungan Birokrasi dalam setiap unit perubahan berpengaruh nyata dan negative terhadap perubahan variable Penyerapan Anggaran sebesar -0,181. Artinya secara parsial jika variable Lingkungan Birokrasi naik 1 unit, maka Penyerapan Anggaran akan turun sebesar 18,1%.

Dari koefisien – koefisien uji t dalam tabel 4, diperoleh signifikansi untuk konstanta b_0 sebesar 0.494 yang dapat diartikan bahwa ketepatan prediksi variable Penyerapan Anggaran dari konstanta mempunyai peluang salah sebesar 49,4% (signifikan pada level 50%). Signifikansi untuk b_1 Perencanaan Anggaran sebesar 0,040 yang berarti bahwa ketepatan prediksi variable Penyerapan Anggaran dari Perencanaan Anggaran mempunyai peluang salah sebesar 4% (signifikan pada level 5%). Signifikansi untuk b_2 Pelaksanaan Anggaran sebesar 0.038 berarti bahwa ketepatan prediksi variable Penyerapan Anggaran dari Pelaksanaan Anggaran mempunyai peluang salah sebesar 3,8 % (signifikan pada level 5%). Signifikansi untuk b_3 Sumber Daya Manusia sebesar 0.012 berarti bahwa ketepatan prediksi variable Penyerapan Anggaran dari Sumber Daya Manusia mempunyai peluang salah sebesar 1,2 % (signifikan pada level 5%). Signifikansi untuk b_4 Pengadaan Barang Jasa sebesar 0.005 berarti bahwa ketepatan prediksi variable Penyerapan Anggaran dari Pengadaan Barang Jasa mempunyai peluang salah sebesar 0,5% (signifikan pada level 1%), Signifikansi untuk b_5 Pelaksanaan Anggaran sebesar 0.215

berarti bahwa ketepatan prediksi variable Penyerapan Anggaran dari Lingkungan Birokrasi mempunyai peluang salah sebesar 21,5% (signifikan pada level 25%).

Dari kelima variable bebas (Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang Jasa dan Lingkungan Birokrasi) berdasarkan koefisien regresi, koefisien korelasi dan signifikansi dapat disimpulkan bahwa ketepatan prediksi dan dominasi pengaruh variable bebas terhadap variable tak bebas secara berurutan adalah :

1. Pelaksanaan Anggaran dengan koefisien korelasi sebesar 29% dan peluang salah sebesar 3,8%,
2. Pengadaan Barang Jasa dengan koefisien korelasi sebesar 28,4% dan peluang salah sebesar 0,5%,
3. Sumber Daya Manusia dengan koefisien korelasi sebesar 27,3% dan peluang salah sebesar 1,2%,
4. Perencanaan Anggaran dengan koefisien korelasi sebesar 23,5% dan peluang salah sebesar 4%,
5. Lingkungan Birokrasi dengan koefisien korelasi negative sebesar 18,1% dan peluang salah sebesar 21,5%.

Hal tersebut berarti bahwa Pengadaan Barang Jasa secara statistik berpengaruh paling dominan dan signifikansi paling tepat terhadap penyerapan anggaran.

Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran baik secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, artinya bahwa semakin baik perencanaan anggaran maka akan semakin baik pula penyerapan anggaran. Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya diantaranya Meyulinda Aviana Alim, dkk (2018), Ledy S. Gagola, dkk (2016), Iqbal (2018), Asriani Rasyid (2017), Alimmudin (2018), Teguh Aji (2018), M. Irwan Tofani (2020), Binti Zulaikah (2019), Asti Damayanti (2017) Jumarny (2019), Tessa Sanjaya (2018), Rifka Ramadhani (2019) yang kesemuanya menyimpulkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Pada tahap penyusunan perencanaan anggaran, SKPD di Kabupaten Kediri berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terakhir dirubah di Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemudian mulai tahun 2020 penyusunan anggaran berpedoman pada Permendagri no 90 tahun 2019. Permendagri tersebut sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Berdasarkan analisa deskripsi statistik, perencanaan anggaran mempunyai nilai rata rata sebesar 4,23 dimana nilai minimum 2,57 dan nilai maksimum 5,00 dengan standar deviasi sebesar 0,59714. Hal ini berarti perencanaan anggaran di Kabupaten Kediri sudah baik. Indikator capaian penyusunan dokumen perencanaan di Kabupaten Kediri dapat dilihat dari persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu, yaitu dengan capaian sebesar 102%. Perolehan capaian diukur dari jumlah dokumen perencanaan sebanyak 6 dokumen yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (P-RKPD) Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan).

Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan anggaran didukung oleh sinergitas yang baik antara pemerintah daerah dengan dewan yang dibuktikan dengan persetujuan yang cepat atas rencana anggaran serta ketika ada revisi akan dibahas dengan cepat dan tidak memerlukan waktu lama. Selain itu kesiapan sarana dan prasana dalam proses penyusunan antara lain aplikasi, peralatan computer serta sarana pendukung lainnya sangat membantu. Anggaran yang ada

di Kabupaten Kediri disusun secara skala prioritas di setiap bidang sesuai tupoksi masing masing SKPD dan peka terhadap persoalan dan kebutuhan masyarakat.

Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran baik secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, artinya bahwa semakin baik pelaksanaan anggaran maka akan semakin baik pula penyerapan anggaran. Hasil penelitian ini juga mendukung beberapa penelitian sebelumnya diantaranya Meyulinda Aviana Alim, dkk (2018), Ledy S. Gagola, dkk (2016) dimana keduanya menyimpulkan bahwa baik secara simultan dan parsial pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan analisa deskriptip statistik, pelaksanaan anggaran mempunyai nilai rata rata sebesar 4,11 dimana nilai minimum 1,83 dan nilai maksimum 5,00 dengan standar deviasi sebesar 0,75477. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan anggaran di Kabupaten Kediri sudah baik.

Pelaksanaan anggaran di Kabupaten Kediri didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing masing instansi yang ditetapkan oleh Bupati pada bulan Desember tahun sebelumnya. Demikian juga SK pengangkatan pejabat yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan anggaran juga ditetapkan di awal tahun, yaitu SK Pengangkatan PA, KPA, PPKeu, PPKom, PPTK, Pejabat Pengadaan dan Bendahara Pengeluaran. Setelah DPA dan Pejabat pelaksana kegiatan ditetapkan, kemudian PPTK menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan jadwal penyediaan anggaran. Jadwal pelaksanaan kegiatan disusun dalam aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) yang harus dientrikan setelah DPA SKPD disahkan. Di aplikasi SIRUP berisi informasi tentang paket pekerjaan, kapan kegiatan dilaksanakan, metode pengadaan, serta kapan barang atau jasa akan dipergunakan. Aplikasi SIRUP ini bisa dilihat semua stakeholder pemerintah daerah sehingga menunjukkan keterbukaan pelaksanaan kegiatan anggaran oleh pemerintah daerah. Sedangkan

Anggaran Kas merupakan jadwal ketersediaan dana dalam rangka untuk pendanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam hal pelaksanaan kegiatan tentunya juga harus memperhatikan Anggaran Kas yang telah disusun, agar ketika kegiatan telah selesai dilaksanakan anggaran sudah telah tersedia. Setelah disusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan jadwal ketersediaan anggaran, pelaksanaan anggaran bisa langsung dilakukan dengan mengikuti prosedur dan peraturan yang ada.

Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia baik secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, artinya bahwa semakin baik sumber daya manusia maka akan semakin baik pula penyerapan anggaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Teguh Bayu Aji Wibowo (2018), Iqbal (2018) yang menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Alimuddin (2018) yang menyebutkan bahwa Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran, dan Rifka Ramadhani (2019) yang menyebutkan Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan analisa statistik deskriptif, sumber daya manusia mempunyai nilai rata-rata sebesar 3,82 dimana nilai minimum 1,69 dan nilai maksimum 5,00 dengan standar deviasi sebesar 0,70269. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan keuangan di Kabupaten Kediri masih tergolong kurang baik. Pergeseran atau mutasi pegawai termasuk pegawai yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan keuangan ataupun pengelolaan pengadaan sering dilakukan, hal ini tentunya akan mempengaruhi kemampuan dan kompetensi pegawai tersebut ketika harus beradaptasi di lokasi yang baru. Kurang adanya mekanisme reward dan punishment dalam instansi juga mempengaruhi motivasi para pegawai dalam bekerja. Pegawai pengelola pengadaan yaitu PA, KPA,

PPKom, dan PPTK menanggung resiko yang sangat besar dalam hal pekerjaannya yang tidak sebanding dengan honor yang diterima. Apalagi untuk pekerjaan konstruksi atau pengadaan yang nilainya besar yang dalam prosesnya pengadaannya harus melalui proses tender. Kegiatan tersebut menjadi sorotan bagi para Aparat Penegak Hukum, LSM serta masyarakat. Hal tersebut yang akhirnya membuat ketakutan pada pegawai pengelola pengadaan tersebut karena banyaknya penangkapan pejabat atas tuduhan korupsi.

Kesesuaian antara Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki dengan deskripsi pekerjaan yang dilaksanakan menjadi salah satu hal penting dalam menunjang pekerjaan. Berdasarkan hasil kuisioner yang telah dibagikan, sumber daya manusia yang kompeten dalam kegiatan pengelolaan keuangan dan pengadaan di Kabupaten Kediri jumlahnya sangat terbatas sehingga sering terjadi rangkap tugas, tentunya hal ini juga membuat hasil pekerjaan tidak maksimal. Dalam hal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia khususnya yang terlibat langsung dengan kegiatan pengelolaan keuangan maka yang bisa dilakukan adalah tidak sering melakukan mutasi atau pergeseran terhadap pegawai khususnya yang sudah mempunyai kompetensi dalam bidang tertentu. Memperbanyak diklat terkait pengelolaan keuangan maupun pengelolaan pengadaan kepada pegawai, sehingga menambah jumlah pegawai yang kompeten dan bidang tersebut, sehingga mengurangi adanya rangkap tugas pegawai. Hal tersebut tentunya akan membuat pegawai bekerja lebih fokus dan maksimal. Mekanisme reward dan punishment tentunya juga seharusnya dilaksanakan, dengan lebih menyesuaikan antara reward dengan resiko pekerjaan. Jaminan perlindungan dan kepastian hukum dari pimpinan kepada pegawai yang sudah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundangan yang berlaku tentunya akan membuat kenyamanan dan semangat pegawai menjalankan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Dengan begitu akan meningkatkan kuantitas dan kualitas pekerjaan dan hasil akhirnya akan meningkatkan penyerapan anggaran.

Pengaruh Pengadaan Barang Jasa terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan barang jasa baik secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, artinya bahwa semakin baik pengadaan barang jasa maka akan semakin baik pula penyerapan anggaran. Hasil penelitian ini juga mendukung beberapa penelitian sebelumnya diantaranya Meyulinda Aviana Alim, dkk (2018), Ledy S. Gagola, dkk (2016) dimana keduanya menyimpulkan bahwa baik secara simultan dan parsial pengadaan barang jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Penelitian lain yang sejalan adalah Rifka Ramadhani (2019), M. Irfan Tofani (2020), Teguh Adi Wibowo (2018), Alimuddin (2018).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Tessa Sanjaya (2018), yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran pada OPD Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan analisa statistik deskriptif data penelitian ini menunjukkan bahwa pengadaan barang jasa mempunyai nilai rata rata sebesar 3,78 dimana nilai minimum 2,00 dan nilai maksimum 5,00 dengan standar deviasi sebesar 0,69410. Hal ini berarti bahwa pengadaan barang jasa di Kabupaten Kediri masih tergolong kurang baik.

Pelaksanaan Pengadaan barang jasa di Kabupaten Kediri berpedoman pada Perpres Nomor 16 tahun 2018 yang perubahannya adalah Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Perubahan Perpres ini adalah untuk penyesuaian penggunaan produk /jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN / APBD dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah untuk kemudahan berusaha berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyesuaian ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Jasa.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah, mengalami beberapa kendala. Kesulitan PPKom dalam penyusunan HPS yang diantaranya

disebabkan terlambatnya penetapan standar harga oleh SKPD membuat penyusunan HPS akhirnya ikut mundur yang berakibat mundurnya jadwal pelaksanaan kegiatan bahkan gagalnya pelaksanaan kegiatan. Sistem pengadaan barang jasa diantaranya proses tender memerlukan waktu lama, proses e catalog terkadang barang yang tersedia sangat terbatas. Hal hal tersebut yang menghambat pelaksanaan pengadaan barang jasa.

Pengadaan barang dan jasa secara statistik berpengaruh paling dominan dan signifikansi paling tepat terhadap penyerapan anggaran. Hal ini karena anggaran untuk pengadaan barang jasa mencapai 30% dalam komponen belanja langsung, yang merupakan urutan kedua setelah belanja tak langsung atau belanja wajib yaitu belanja pegawai. Hal ini berarti bahwa jika pelaksanaan barang jasa dilakukan secara maksimal, maka penyerapan anggaran akan semakin baik.

Pengaruh Lingkungan Birokrasi terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan birokrasi secara simultan dan parsial berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran, artinya bahwa semakin baik lingkungan birokrasi justru akan menurunkan penyerapan anggaran. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya diantaranya Meyulinda Aviana Alim, dkk (2018), Ledy S. Gagola, dkk (2016) dimana keduanya menyimpulkan bahwa baik secara simultan dan parsial lingkungan birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Birokrasi merupakan seperangkat aturan yang dijalankan oleh para pejabat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aturan-aturan itu dibuat guna mempermudah proses pelayanan publik (Albrow dalam Zauhar, 1996). Dalam penelitian ini ruang lingkup lingkungan birokrasi adalah mengenai lingkungan kerja, hubungan pegawai dengan atasan, hubungan antar pegawai, serta aturan dan prosedur mengenai penyerapan anggaran.

Dari hasil analisa statistik deskriptif, lingkungan birokrasi mempunyai nilai rata rata sebesar 4,15 dimana nilai minimum 2,18 dan nilai maksimum 5,00 dengan standar deviasi sebesar 0,63484. Hal ini berarti bahwa berdasarkan persepsi dari total 82 responden

menyatakan bahwa lingkungan birokrasi di Kabupaten Kediri tergolong sudah baik. Capaian tersebut dapat dilihat dari adanya prosedur persetujuan pimpinan dalam setiap pengambilan keputusan, dan persetujuan tersebut tidak memerlukan waktu lama dan selalu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Suasana lingkungan kerja yang kondusif, hubungan dan koordinasi yang baik diantara pegawai yang pengelola anggaran dan pengelola keuangan akhirnya membuat proses dalam pencairan anggaran menjadi lebih cepat.

Namun dalam model regresi yang dihasilkan dalam penelitian ini, lingkungan birokrasi mempunyai pengaruh nyata dan negative, yang artinya ketika semakin baik lingkungan birokrasi maka penyerapan anggaran justru akan turun. Di Kabupaten Kediri untuk serapan anggaran tahun 2016 – 2020, prosedur proses pencairan anggaran yang khususnya dari kegiatan pengadaan barang jasa dengan nilai yang besar memerlukan waktu agak lama, karena harus melalui proses pembuatan nota dinas yang ditujukan kepada Bupati untuk persetujuan. Ketika Bupati sedang tidak ada di tempat, proses persetujuan menjadi tertunda dan proses pencairan anggaran akan mundur. Hal ini yang menyebabkan keengganan melakukan pengadaan barang jasa karena proses pencairan yang rumit. Dengan demikian ketika semakin ketat dan rumit prosedur birokrasi dalam proses penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai dengan pencairan anggaran, tentunya mempengaruhi proses pencairan anggaran akan semakin sulit yang akhirnya membuat penyerapan anggaran menjadi turun. Jadi perlu adanya penyederhanaan birokrasi mulai dari proses penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai dengan pencairan anggaran agar penyerapan anggaran bisa maksimal.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sumber daya manusia, pengadaan barang jasa dan lingkungan birokrasi secara simultan (bersama sama) berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Secara parsial Perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sumber daya manusia,

pengadaan barang jasa masing masing berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran, sedangkan Lingkungan birokrasi berpengaruh negative terhadap penyerapan anggaran.

Keterbatasan penelitian ini adalah nilai Adjusted R² yang cukup rendah yaitu sebesar 0,410 menunjukkan bahwa variable independen yaitu perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sumber daya manusia, pengadaan barang jasa dan lingkungan birokrasi hanya mampu menjelaskan sebesar 41% atas perubahan pada variable dependen yaitu penyerapan anggaran, dan selebihnya sebesar 59 % dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diikuti dalam penelitian ini, dan instrumen yang digunakan dalam penelitian berupa kuisioner yang terdiri dari lima variable bebas dan satu variable terikat dengan jumlah total pernyataan 89 item, sehingga dimungkinkan terjadi tingkat kejenuhan tinggi bagi responden dalam menjawab.

Saran yang bisa diberikan adalah hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dalam upaya meningkatkan penyerapan anggaran di Kabupaten Kediri dengan meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sumber daya manusia, pengadaan barang jasa dan penyederhanaan birokrasi, dan bagi penelitian selanjutnya, dapat menentukan variabel lain yang diidentifikasi dapat berpengaruh lebih tinggi terhadap penyerapan anggaran. Juga dapat lebih menyederhanakan item pernyataan dalam kuisioner sehingga mengurangi tingkat kejenuhan responden dalam menjawab kuisioner.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, 2018, *Analisis Penyerapan Anggaran Di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Dan Kopertis Makassar*, Makassar, Universitas Hasanudin.
- Arikunto. S, 2017,. *Pengembangan Instrumen Penelitian Dan Penilaian Program*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asti Damayanti, 2017, *Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi Kasus Pada Pusat Survei Geologi*

- Bandung), Unikom Repository, 10 November 2017, <https://repository.unikom.ac.id/54104/>
- Binti Zulaikah, Dian Imanina Burhany, 2019, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran Pada Trivulan IV Di Kota Cimahi*, Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar, Vol. 10 No. 1 <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/proceeding/article/view/1450>
- Cut Malahayati, Islahuddin, Hasan Basri, 2015, *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh*, Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, vol. 4, No. 1 pp. 11-19, ISSN 2302-0199 <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4451/3832>
- Denita Lilik Mastuti, Suharno & Djoko Kristianto 2017, *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran, Lingkungan Birokrasi, Komitmen Manajemen, Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran*, Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 13 No 3 September 2017: 367 – 377 368 <http://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/1849>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2013. *Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Kursus Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Dwiyana, Nova. 2017, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan Dengan Monitoring Dan Evaluasi Sebagai Variabel Moderating*, Universitas Sumatera Utara, <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/634>
- Elypaz Donald Rerung, Herman Karamoy, Winston Pontoh, 2017, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*. <http://ejournal.unstrat.ac.id/index.php/goodwill/article/download>
- Fajar Saputro, Bambang Setyobudi Irianto, dan Eliada Herwiyanti, 2016, *Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Anggaran Sektor Publik*, Soedirman Accounting Review 1 (1) Desember 2016
- Ghozali, Imam. 2018, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. 2014, *Manajemen Keuangan Sektor Publik : Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Daerah)*, Jakarta : Salemba Empat, Cetakan 1
- Hardani, 2020, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu, cetakan 1. <http://demonstran.com/nasdem-perencanaan-kurang-matang-berakibat-silpa-apbd-kabupaten-kediri-tinggi/>
- <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3867885/birokrasi-adalah-entitas-penting-suatu-negara-ini-pengertiannya-menurut-para-ahli>
- Iqbal, M., 2018, *Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi*, Makasar, Universitas Hasanudin.
- Juliani, Dian. 2014, *Pengaruh Faktor-Faktor Kontekstual Terhadap Persepsi Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 11 No. 2, hal. 177 – 199
- Jumarny, 2019, *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Kejelasan Anggaran Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada LAIN Ambon)*, Jurnal SOSOQ Volume 7 Nomor 2, Agustus 2019

Kabupaten Kediri Dalam Angka, *Kediri Regency in Figures 2020*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, Katalog 1102001.3506

Kadek Mia Ranisa Putri, Gede Adi Yuniarta, Made Aristia Prayudi, *Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran (Survei Pada SKPD di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha, Vol. 8, No. 2 (2017)
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/13679>

Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor Kepdirjen No KEP-199/PB/2010 Tentang : *Petunjuk Teknis Monitoring Dan Evaluasi Penyerapan Anggaran*,
<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/sjdi/index.php?page=14&kat=11&cp=&h=&t=>

Ledy S. Gagola, Jullie J. Sondakh, Jessy D.L. Warongan, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud*, Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”, vol.8. no. 1 2017
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/15330/14880>

Lrestiwawan, Luky. 2017, *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Ponorogo)*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
<https://docplayer.info/30598732>

M. Irwan Tofani, Amir Hasan, Nasrizal, 2020, *Analysis Of The Factors That Affects The Budget Absorption In The Riau And Kepri Supreme Courts With Organisational Commitments As The Moderating Factor*, Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 4 No. 2, Juni 2020 (165-182)

Meyulinda Aviana Elim, Deasy Susana Ndaparoka, Thobias Elianus David Tomasowa, 2018, *Analisis Faktor –*

Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Kupang, Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Audit Vol. 3 No. 2, Halaman: 46 – 56 Desember 2018

Monik Zarinah, Dr. Darwanis, SE, M.Si, Ak, CA, Dr. Syukriy Abdullah, SE, M.Si, Ak, 2016, *Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kualitas Sumber Daya Anusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara*, Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 5 No 1, pp 90 – 97, ISSN 2302 – 0164

Mudrajad, Kuncoro. 2013. *Mudah Memahami Dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta : Upp Stim Ykpn.

Nanik Tsania Hasni, 2016, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang*, Jurnal Telaah Manajemen Vol. 13 Edisi 1, April 2016, hal 33 – 44

Negara, Aji Surya Atma. 2017, *Analisis Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Pada 7 Satuan Kerja Di Wilayah Kerja KPPN Palembang*, POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA.
<http://eprints.polsri.ac.id/6158/>

Nina Sudarwati, Herman Karamoy, Winston Pontoh, 2017, *Identifikasi Faktor-Faktor Penumpukan Realisasi Anggaran Belanja Di Akhir Tahun (Studi Kasus Pada Balai Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup Dan Kebutanan Manado)*, Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”, Vol. 8, No. 1
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/15332>

Nurul Fajar, Muhammad Arfan, *Analisis Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh*, Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, vol. 10 No. 2 Juli 2017, PP 95-102
<http://jurnal.unsyiah.ac.id/tra> ISSN 1693-3397

- Pratama, Novrian Dandi. 2018, *Determinan Efektivitas Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dan Penyerapan Anggaran Di Pemerintah Daerah*, Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan, Vol. 8 No. 1 <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak/article/view/5056>
- Rahadi Nugroho, Salman Alfarisi, 2017, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Melonjaknya Penyerapan Anggaran Quartal IV Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan)*, Jurnal BPPK, Vol. 10 No. 1 hal. 22-37. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnalbppk/article/download/23/95>
- Rasyid, A., 2017, *Pengaruh Perencanaan, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Penyerapan Anggaran Pada Lembaga Administrasi Negara*, Makasar, Universitas Hasanudin
- Rifka Ramadhani, Mia Angelina Setiawan, 2019, *Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia Dan Pengadaan Barang/ Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada OPD Provinsi Sumatera Barat*, Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(2), Seri B, 710-726.
- Sekaran, Uma. 2014. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis (Research Methods For Business)*, Jakarta: Salemba Empat, Buku 1 Edisi 4.
- Solimun. (2010). *Analisis Variabel Moderasi Dan Mediasi*. Malang: Program Studi Statistika FMIPA-UB. https://www.academia.edu/8314503/Solimun_Program_Studi_Statistika_FMIPA_UB_31_V_ANALISIS_VARIABEL_MODERASI_DAN_MEDIASI
- Sudasri, David. 2016, *Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi Empiris Pada SKPD Di Kota Padang)*, Universitas Negeri Padang <http://repository.unp.ac.id/17701/>
- Sutrisno, Edy, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Kencana, Cetakan ke – 8
- Syahrum, Salim, 2012, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung, Citapustaka Media
- Teguh Bayu Aji Wibowo, 2016, *Analisis Variabel Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran (Studi Pada Satuan Kerja Di Wilayah Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Vol. 6, No. 2. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5011/4398>
- Tessa Sanjaya, 2018, *Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran Dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Pada OPD Provinsi Sumatera Barat*, Artikel, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Wahyu Sidik Purnomo, 2019, *Pengaruh Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kediri)*, Universitas Islam Kadiri
- Yuniningsih,T. 2019, *Kajian Birokrasi*, Departemen Administrasi Publik FISIP Undip Semarang, cetakan ke 1.